

DEMOKRASI DI MATA INTELEKTUAL MUSLIM DI INDONESIA ERA ORDE BARU

Oleh :

Muchamad Toif Chasani
Dosen STAIN Gajah Putih
Takengon

ABSTRAK

Seiring dengan banyaknya kerusakan masyarakat disebabkan pengaruh kolonialis dan budaya asli Indonesia, maka bangkitlah gerakan purifikasi Islam yang dipimpin oleh Syeikh Muhammad Djamil Djambek (1860-1947), Abdul Karim Amrullah (1879-1945) dan Haji Abdullah Ahmad (1878-1933) di Sumatera Barat. Selanjutnya K.H. Ahmad Dahlan di Jogjakarta mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912 sebagai upaya untuk melakukan pembaruan dalam pemikiran Islam

A. Pendahuluan

Sebagai negara yang penduduknya mayoritas muslim dan menggunakan sistem demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, maka Indonesia menjadi menarik untuk dikaji.

Di Indonesia, Islam masuk ke Indonesia sejak abad pertama Hijriyah.¹ Pada waktu itu, yang sudah memeluk Islam adalah orang yang sering bepergian dengan menggunakan akses pelabuhan-pelabuhan penting di Nusantara. Perlahan Islam menyebar menjadi agama masyarakat dan pada akhir abad ke-13 berdirilah kerajaan Islam pertama Samudera Pasai di Sumatera

¹ Ada beberapa teori tentang masuknya Islam ke Indonesia, diantaranya adalah: (a) teori Gujarat, (b) teori Persia, dan (c) teori Arab. Teori Gujarat adalah teori masuknya Islam ke Indonesia yang pertama kali dikemukakan oleh Snouck Hurgronje dan J. Pijnappel. Dalam teori ini disebutkan bahwa Islam di Indonesia sebetulnya berasal dari Gujarat, India dan mulai masuk sejak abad ke 8 Masehi, karena didasarkan pada adanya bukti berupa batu nisan Sultan Samudera Pasai Malik as-Saleh berangka tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Selain itu, juga didasarkan pada corak ajaran Islam yang cenderung memiliki warna tasawuf yang dipraktikkan oleh orang muslim di India Selatan, mirip dengan ajaran Islam di Indonesia pada awal berkembangnya Islam. *Teori Persia* adalah teori masuknya Islam ke Indonesia yang dikemukakan oleh Hoessein Djajadiningrat. Dalam teori ini dikemukakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia adalah Islam yang berasal dari Persia (Iran) mulai pada abad ke 12. Teori persia berlandaskan pada bukti maraknya paham Syiah pada awal masuknya Islam ke Indonesia. Teori Arab atau Teori Mekah diyakini berasal dari Arab, yaitu Makkah dan Madinah pada abad perama Hijriah atau abad ke 7 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada adanya bukti perkampungan Islam di Pantai Barus, Sumatera Barat, yang dikenal sebagai Bandar Khalifah. Wilayah ini disebut dengan wilayah Ta-Shih. Ta-Shih adalah sebutan orang-orang China untuk orang Arab. Bukti ini terdapat dalam dokumen dari Cina yang ditulis oleh Chu Fan Chi yang mengutip catatan seorang ahli geografi, Chou Ku-Fei. Dalam dokumen China keberadaan komunitas muslim Arab di Pantai Barus tercatat sekitar tahun 625 Masehi. Bukti arkeologis juga ditemukan di Barus, berupa sebuah makam kuno di kompleks pemakaman Mahligai, Barus. Pada salah satu batu nisannya tertulis nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 M. Sumber: <http://kisahasalusul.blogspot.com/2015/11/3-teori-masuknya-islam-ke-indonesia>

bagian utara.² Begitu juga perkembangannya di Jawa, sehingga berdirilah kerajaan Demak pada akhir abad ke-15.³

Sejak kedatangan kolonialis dari Eropa, penduduk Indonesia terpecah menjadi dua bagian, yang pertama menerima dengan harapan agar hartanya tidak diganggu dan ada yang menolaknya.⁴ Orang yang menerima segera mendapat tempat di pemerintahan kolonial Belanda. Pemerintah Kolonial Belanda membagi penduduk yang tinggal di Indonesia dengan empat kelas, kelas pertama adalah para pendatang dari Eropa, kelas kedua adalah para pendatang dari Timur seperti Arab dan Cina, kelas ketiga adalah para elit pribumi dan kelas terendah adalah penduduk Indonesia umumnya.⁵

Seiring dengan banyaknya kerusakan masyarakat disebabkan pengaruh kolonialis dan budaya asli Indonesia, maka bangkitlah gerakan purifikasi Islam yang dipimpin oleh Syaikh Muhammad Djamil Djambek (1860-1947), Abdul Karim Amrullah (1879-1945) dan Haji Abdullah Ahmad (1878-1933) di Sumatera Barat. Selanjutnya K.H. Ahmad Dahlan di Jogjakarta mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912 sebagai upaya untuk melakukan pembaruan dalam pemikiran Islam.⁶ Dalam gerakannya, Muhammadiyah mengedepankan *tajdid* dengan slogan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah yang diantara idenya adalah dengan mengesampingkan *taqlid* terhadap Imam empat madzhab yang selama ini diyakini oleh mayoritas penduduk muslim Indonesia. Sebagai antitesis dari gerakan ini maka K.H. Hasyim Asy'ari mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama pada tahun 1926 yang dipusatkan di Surabaya.

B. Islam dan Negara pada era modern

a. Latar Belakang Sejarahnya

Pendidikan Islam tidak memiliki tempat dalam pemerintahan kolonial Belanda, meskipun secara individu hak mereka tetap diakui, sehingga berpengaruh pada tidak berkembangnya pendidikan agama Islam. Dalam bidang ekonomi, dominasi pedagang dari Cina menggejala. Hal ini membuat polarisasi bersatunya para pengusaha muslim di bawah

Marshall Cavendish Reverence, ²*World and Its Peoples: Indonesia and East Timor, Eastern and Southern Asia*, Volume 10, New York, 2007. Hal. 1337.

³Kit Gin Ooi, *Southeast Asia: A Historical Encyclopedia, from Angkor Wat to East Timor*, Volume 1, Santa Barbara, California. Hal. 410.

⁴Verena Beittinger-Lee, *(Un) Civil Society and Political Change in Indonesia: A Contested Arena*, Routledge, Jan 11, 2013. Hal. 57.

⁵[Alamsyah Ratu Perwiranegara](#), *Islam dan Pembangunan Politik di Indonesia*, Haji Masagung, 1987. Hal. 152.

⁶[Sutrisno Kutoyo](#), *Sejarah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Januari, 1997. Hal. 190.

Sarekat Dagang Islam yang diketuai oleh H. Samanhudi. SDI pada perjalanannya tidak hanya berkecimpung dalam bidang ekonomi, tetapi juga meluas ke wilayah politik. Hal ini berakibat pada pelarangan organisasi yang bersifat nasional. Pemerintah kolonial Belanda membatasi pada organisasi lokal.⁷

b. Kebijakan Pemerintah terhadap Islam

Kegagalan revolusi yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia memberikan harapan pada para Islamis. Diiringi dengan orang-orang abangan yang mulai ramai ke masjid-masjid serta Islam dipelajari dimana-mana. Masyumi yang sudah dibubarkan pada era pemerintahan Sukarno menguat kembali. Namun setelah dilantik menjadi pejabat Presiden, Suharto mendirikan Golongan Karya dengan dukungan pemerintah dan militer dan mengisyaratkan bahwa Masyumi tidak akan mendapat izin dari pemerintah.⁸

Peningkatan geliat keagamaan juga terlihat dalam bidang pendidikan, baik secara managerial maupun infrastruktur sejak pendidikan dasar hingga perguruan tinggi Islam. Dan pada tahun 1989 dikeluarkan kebijakan penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah dari dua pintu, pendidikan umum diselenggarakan oleh Depdikbud dan pendidikan keagamaan oleh Departemen Agama.

Dalam hal peradilan, khususnya pernikahan, perundangan yang berlaku sejak zaman Kolonial Belanda tetap dipakai hingga era orde baru. Para intelektual muslim saat itu berhasil merubah 11 unsur pernikahan dalam perundangan yang bertentangan dengan syariat Islam.

Setelah tahun 1990 beberapa kebijakan pemerintah sudah mulai berubah menjadi lebih akomodatif terhadap aspirasi muslim, seperti adanya pelajaran Bahasa Arab di TVRI, dimana sebelumnya selalu mendapat larangan meski permintaan terhadap tayangan ini terus diperjuangkan.

Dalam bidang ekonomi, pemerintah mendukung didirikannya perbankan yang mengacu pada syariat Islam, Bank Muamalat Indonesia, yang selanjutnya diikuti dengan berdirinya lembaga-lembaga keuangan

⁷Slamet Muljana, *Kesadaran Nasional: dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan*, PT LKiS Pelangi Aksara, 2008. Hal. 121.

⁸Seksi Penerangan KOTI, *Gabungan Penerangan ABRI dalam rangka pengamanan sidang umum istimewa M.P.R.S. Indonesia. Angkatan Bersenjata. Gabungan Penerangan*, 1967 - [Indonesia](#).

Islam lainnya. Selain itu pemerintah juga mendirikan Badan Zakat, Infak dan Sedekah (BAZIS) untuk menampung dan menyalurkan donasi dari kalangan muslimin dengan pengawasan ketat penggunaannya dari pemerintah.

Dan yang paling penting, Presiden mendorong berdirinya ICMI pada Desember 1990 yang dikepalai oleh B.J. Habibie. Dan dampak paling nyata adalah dengan terpilihnya Habibie menjadi anggota MPR (1992-1997) dan menjadi Menristek (1993-1998). Meski para anggota ICMI berargumen bahwa menjadi menteri bukanlah tujuan mereka, tetapi ini adalah kali pertama porsi menteri Muslim sesuai dengan perimbangan jumlah penduduk muslim di Indonesia (88%).

c. Islam dan Filosofi Kenegaraan

Menjadi muslim berarti bukan hanya menjadikan Islam sebagai konsep teologi, tetapi juga menjadikannya jalan hidup (*way of life*) yang didalamnya tercakup nilai-nilai pribadi, kemasyarakatan dan kenegaraan. Islam tidak seperti konsep Kristen yang pure teologi atau konsep sekular yang memisahkan antara agama dan negara.

Dalam rentang sejarah, perjuangan para pemimpin Islam di Indonesia sudah pernah mencoba menjadikan Islam sebagai dasar negara, diantaranya pada saat persiapan kemerdekaan Indonesia tahun 1945 dan yang kedua dilakukan oleh para anggota parlemen muslim sepanjang tahun 1956-1959. Namun kedua upaya ini belum sukses. Meskipun para tokoh ormas Islam ada yang berpendapat bahwa Pancasila-lah yang menjadi *rule of the game*, seperti Ketua NU Abdurrahman Wahid.⁹

Organisasi Islam yang pertama kali menerima konsep pemerintahan non-Islam adalah NU, dimana menyatakan bahwa adanya pemerintahan yang religius lebih baik daripada terus berkonfrontasi untuk memperjuangkan legalitas syariat Islam sebagai dasar negara. Berbeda dengan para reformis dalam Masyumi-Parmusi, yang terus melakukan upaya-upaya pelegalan syariat, hingga dengan akibatnya sokongan pemerintah, Parmusi disingkirkan dari perpolitikan setelah sebelumnya disterilkan dari tokoh-tokoh Islam militan.¹⁰

Sehingga praktis sejak 1969 tidak ada diskusi serius untuk menjadikan Islam sebagai ideologi alternatif di Indonesia, namun studi

⁹[Ma'mun Murod Al-Brebesy](#), *Menyingkap pemikiran politik Gus Dur & Amien Rais Tentang Negara*, Raja Grafindo Persada, Jan 1, 1999. Hal. 173.

¹⁰[Dhurorudin Mashad](#), *Akar konflik politik Islam di Indonesia*, Pustaka Al-Kautsar, 2008. Hal. 62.

akademis tentang Islam sebagai negara justru merebak. Banyak buku tentang teori politik Islam diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, baik dari figur fundamentalis seperti Abul A'la Al Maududi, Sayyid Qutb atau Abdul Qadir Audah ataupun yang berasal dari para orientalis seperti Jhon L. Esposito, Montgemery Watt, dan James Pescatori.

Dari perdebatan ini memunculkan pendapat yang menyatakan bahwa Islam bukanlah konsep kenegaraan, karena di dalam Al-Qur'an sama sekali tidak tercantum kata *Dawlah Islamiyah* (pemerintahan Islam), yang digaungkan oleh Nurcholis Madjid dan pendapat yang mengatakan bahwa memang benar meski dalam Al-Qur'an tidak menyatakan secara eksplisit tentang pemerintahan Islam, namun dalam banyak ayatnya Al-Qur'an menyatakan tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan.

C. Respon terhadap konsep demokrasi dan hak asasi manusia (HAM)

a. Respon terhadap konsep demokrasi

Demokrasi dikenal sejak 5 abad sebelum masehi, dimana digulirkan sebagai kontra terhadap pemerintahan monarki dan otoritarianisme pemerintah Yunani Kuno.¹¹ Saat itu demokrasi berarti penyelenggaraan pemerintah yang mengakomodir aspirasi rakyat dengan mekanisme perwakilan dalam badan legislatif.

Dalam perkembangannya demokrasi berkembang menjadi lebih banyak mencakup nilai-nilai universal, seperti kesetaraan, kebebasan, pluralisme, kebebasan bahkan nilai-nilai budaya lokal yang ada pada masing-masing negara.

Sejak era kebangkitan nasional di paruh pertama abad 20, para pemimpin dan intelektual muslim telah merespon demokrasi sebagai sebuah sistem yang harus dipraktekkan dalam kehidupan sosial dan politik. Seperti Mohamad Natsir yang mendukung demokrasi, meskipun dia memiliki pandangan yang berbeda tentang demokrasi. Menurutnya, Islam adalah demokratis, karena Islam menentang absolutisme dan otoritarianisme.

Secara umum para pemimpin dan intelektual muslim mendukung demokrasi dengan dua alasan: *pertama*, karena nilai-nilai demokrasi sejalan dengan nilai Islam dalam hal sosial kemasyarakatan, dan *kedua*,

¹¹[Ahmad Syafii Maarif](#), *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu, Masa Demokrasi Terpimpin, 1959-1965*, Gema Insani, 1996. Hal. 196.

demokrasi cocok untuk diterapkan di Indonesia karena dapat mengakomodir kepentingan muslim sebagai mayoritas di Indonesia.

Secara teologi mereka menerima Islam karena berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan praktik sejarah periode Nabi SAW dan al-Khulafa' al-Rasyidin. Diantaranya ayat : "*wa syawirhum fi al-amr*" (QS. 3: 159) dan "*wa amruhum syuro baynahum*" (QS. 42: 38). Meskipun intelektual muslim berbeda-beda dalam syarat penerimaannya di Indonesia, namun secara umum mereka menerima penerapan demokrasi.

b. Respon terhadap konsep hak asasi manusia

Istilah demokrasi dan hak asasi manusia adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap saling menguatkan. Di Barat hak asasi manusia pertama kali digulirkan melalui Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat tahun 1776 M, yang berbunyi: "... seluruh manusia diciptakan sejajar, tidak ada yang lebih hina di hadapan Pencipta dengan hak yang sama dalam kehidupan ini, kebebasan dan dalam merengkuh kebahagiaan...". Serta disusul dengan *Declaration des Droits de l'Homme at du Citoyen*¹² (Deklarasi hak asasi manusia sebagai individu dan penduduk) pada tahun 1789 dengan slogan *liberte* (merdeka), *egalite* (kesetaraan), and *fraternite* (persaudaraan).

Formulasi hak asasi manusia dalam negara Islam diawali dengan *Deklarasi Hak Asasi Manusia dalam Islam* di Kairo tahun 1990 setelah melalui perdebatan memakan waktu 13 tahun. Deklarasi ini memuat 25 aspek individual, diantaranya sosial, ekonomi, atau politik.

Di Indonesia, intelektual muslim mendukung prinsip-prinsip hak asasi manusia meskipun pendapat mereka beragam. Abdurrahman Wahid misalnya, mengatakan bahwa manusia memiliki posisi tinggi dalam tata kosmos, sehingga mereka harus ditempatkan pada porsi dan posisi terhormat.¹³

Dalam Al-Qur'an surat al-Isra (17: 70): "*Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan*".

¹²Human Rights from Exclusion to Inclusion; Principles and Practice: An Anthology from the Work of Theo Van Boven, Martinus Nijhoff Publishers, May 11, 2000. Hal. 39.

¹³Frieda N. R. H., Darmono S. S., Manusia seutuhnya, Beberapa Gagasan, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1984. Hal.29.

Intelektual muslim secara umum lebih melihat masalah dari hak asasi manusia dengan 6 kesimpulan: (1) hak hidup, (2) hak kebebasan beragama, (3) hak kebebasan berpikir dan berbicara, (4) hak kepemilikan harta, (5) hak bekerja dan (6) hak memilih pimpinan daerah.

D. Respon terhadap nilai-nilai Demokrasi

a. Respon terhadap prinsip kesetaraan

Kesetaraan derajat manusia adalah hak sipil yang paling fundamental. Kesetaraan ini bukan berarti sama dalam segala aspeknya, tentu ada sisi-sisi yang berbeda seperti umur, jenis kelamin, kesehatan, bentuk tubuh, dan intelektual.

Intelektual muslim mengusung prinsip *al-musawa* (kesetaraan) sebagai fitrah manusia, walaupun mereka memiliki konsep yang berbeda dalam menjelaskan prinsip ini. Harun Nasution dan Tahir Azhary mendasarkan argumen prinsip kesetaraan mereka pada Al-Qur'an Surat Al-Hujurat (49: 13) yang artinya: *"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."* Dan dengan hadits Nabi SAW: *"Wahai manusia, sesungguhnya Tuhanmu satu, leluhurmu satu. Kalian adalah keturunan Adam dan dia diciptakan dari tanah. Yang paling mulia diantaramu adalah yang paling bertakwa. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dengan 'ajam atau 'ajam dengan Arab atau yang berkulit putih terhadap yang berkulit hitam atau antara yang berkulit hitam terhadap yang berkulit putih kecuali takwa."*

Nurcholis Madjid menekankan kesetaraan dalam bidang akhlaq dan hak politik¹⁴, sementara Amien Rais dan Azhary menekankan kesetaraan dalam bidang hukum. Amien Rais menentang kesetaraan dalam bidang politik, dengan alasan Islam tidaklah sama dengan komunisme yang memiliki konsep sama rata sama rasa dalam bernegara. Meski intelektual muslim berbeda dalam merespon konsep kesetaraan, namun mereka sepakat bahwa pendidikan bukan hanya hak seluruh bangsa, tetapi kewajiban mereka.

¹⁴[Mohammad Monib, Islah Bahrawi](#), *Islam & Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, Gramedia Pustaka Utama, 2011. Hal. 259.

b. Respon terhadap prinsip kebebasan

Abdurrahman Wahid berpendapat bahwa ayat Al-Qur'an yang menyatakan *afala ta'qilun* atau *afala tatafakkarun* berarti setiap individu dituntut untuk berpikir, sedangkan hasil dari apa yang mereka pikirkan tentu berbeda-beda. Hal ini berarti kebebasan berpikir adalah juga menjadi hak setiap individu.¹⁵

Selain itu intelektual muslim berbeda-beda dalam memberi batasan kebebasan, diantaranya; kebebasan berpikir adalah akar dari kebebasan itu sendiri (Rais), kebebasan beragama adalah pusat dari kebebasan dalam hal sosial politik manusia.

E. Respon terhadap demokrasi di Indonesia

a. Respon terhadap demokrasi pancasila

Intelektual muslim memiliki respon yang berbeda terhadap demokrasi pancasila. Saifudin Zuhri, misalnya, mengatakan bahwa Demokrasi Pancasila tidaklah berbeda dengan demokrasi lainnya, *democracy is democracy*. Senada dengannya, Amien Rais juga mengatakan bahwa demokrasi Pancasila lebih berdasar pada moral adiluhung karena dilandasi dengan prinsip Ketuhanan yang Maha Esa. Karenanya Demokrasi Pancasila dianggap tidak mencederai hukum Agama yang mencakup halal dan haram.¹⁶

Ismail Suny menyetujui Demokrasi Pancasila selama tidak keluar dari tujuh prinsip yang tertuang dalam UUD 1945. Ketujuh prinsip tersebut, menurutnya, harus dijadikan mekanisme penyelenggaraan demokrasi pancasila. Ada banyak istilah dalam demokrasi; demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, serta demokrasi tradisional. Setiap istilah yang mengiringinya memberikan karakteristik yang berbeda dalam pelaksanaannya.¹⁷

Nurcholish Madjid menghubungkan demokrasi pancasila dengan istilah-istilah keislaman. Menurutnya Demokrasi Pancasila adalah *ra's al-hikmah al-mashura* (inti kebijaksanaan yang mendalam). Menurutnya, dalam banyak istilah Demokrasi Pancasila pada pelaksanaannya banyak

¹⁵Masykuri Abdillah, Wahid Wahab, *Demokrasi diPersimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, PT Tiara Wacana, 1999. Hal. 140.

¹⁶Abdul Munier Mulkhan, *Politik Santri: Cara Menang Merebut Hati Rakyat*, Kanisius, 2009. Hal. 242.

¹⁷Ismail Sunny, *Melacak jejak Prof. Dr. Ismail Suny, S.H., M.C.L.: Profesor, Investor, Dan Ambassador: Lima Puluh Tahun Perkawinan Ismail Suny-Rosna Daud, 1958-2008*, [Pustaka Sinar Harapan \(Firm\)](#), Pustaka Sinar Harapan, 2008. Hal. 59.

menggunakan istilah dari Bahasa Arab, seperti dewan, musyawarah, mufakat, wajib, bina, wujud, hakim, amal, adil, tertib, aman, wakil, daerah, wilayah, amar, maklumat, resmi dan lain-lain.

b. Respon terhadap proses Demokrasi

Suny mencermati proses demokrasi dalam hal pemilihan wakil rakyat seharusnya berdasar sistem distrik, tidak seperti yang ada sedang dijalankan (saat itu adalah pemilihan partai), sehingga wakil rakyat yang kinerjanya mengecewakan tidak akan dipilih lagi dan pertanggungjawabannya jelas kepada konstituennya.

Wahid mencermati proses demokrasi dari pelaksanaan pemilunya. Karena komposisi anggota Lembaga Pemilihan Umum dipilih dan ditetapkan oleh pemerintah sehingga sulit untuk bisa independen. Seharusnya dipilih oleh anggota DPR yang lebih variatif.

Mayoritas intelektual muslim Indonesia khawatir terhadap pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Rais, misalnya, mengatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih sangat lemah karena seringkali ada pembiaran ketika elit yang melakukan pelanggaran. Dia mengingatkan bahwa proses perubahan perundangan membutuhkan waktu yang panjang serta keinginan yang kuat terhadap kemajuan bangsa dari para wakil rakyat.

Madjid mencermati proses demokrasi dari sisi kebebasan berbicara dan berpendapat.¹⁸ Menurutnya, izin yang diberikan kepada media informasi masyarakat agar seharusnya tidak mudah ditutup ketika menyuarakan hal yang berbeda dengan kebijakan pemerintah. Jika mengikuti alur dalam perundangan yang ada, maka pembredelan media massa akan menjadi senjata dalam 'menghabisi' lawan-lawan politik dari pemerintah yang berkuasa. Bagaimanapun Madjid tetap mengapresiasi pada kebebasan yang bertanggung jawab. Karena kasus-kasus media yang menampilkan pornografi akan sulit dibendung jika masing-masing penyelenggaranya tidak memiliki tanggung jawab moral.

Adi Sasono merespon proses demokrasi dari sisi sosial. Menurutnya, ketimpangan sosial terjadi disebabkan oleh pendekatan politik karena kemiskinan bisa dihilangkan dengan kekuatan pemerintah. Ada dilema

¹⁸[Mohammad Monib, Islah Bahrawi](#), *Islam & Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, Gramedia Pustaka Utama, 2011. Hal. 185.

antara status quo dengan pendatang baru dalam perpolitikan. Seringkali status quo bersikap tidak adil terhadap masyarakat. Kemiskinan harus dihilangkan sedikit demi sedikit oleh pemerintah dengan pendekatan struktur yang kuat secara terus menerus.¹⁹

F. Aspirasi muslim di bawah negara demokrasi indonesia

a. Kepentingan muslim dalam masalah sosial

Aspirasi masyarakat muslim terhadap demokrasi di Indonesia bergantung pada tinggi rendahnya pemahaman masing-masing, meskipun pola hubungan ini tidak selamanya dilihat dari sisi pengetahuan agama Islam. Karena sebenarnya penduduk itu dapat dikategorikan lagi menjadi tradisional, modernis, reformis, fundamentalis, dan neo modernis.²⁰

Penduduk muslim di Indonesia menjalankan ajaran agama mereka di Indonesia terbatas pada masalah aqidah dan akhlaq saja. Karena berada di negara yang tidak menjadikan syariat Islam sebagai dasarnya maka mereka menggunakan ijtihad apabila ada hal-hal yang berada di luar jangkauan mereka.

Para pendukung idealis Islam selalu berupaya untuk menjadikan Islam sebagai *way of life*, sehingga mereka mendorong adanya konsep ekonomi Islam, politik Islam, sains Islami, dan lain-lain. Upaya ini sebagai anti thesis terhadap Lembaga Pendidikan Islam yang hanya menjadikan Islam sebagai objek kajian, bukan menjadikannya sebagai *way of life*.²¹

G. Kesimpulan

1. Intelektual muslim di Indonesia merespon ide-ide demokrasi dengan tidak terpisahkan dari upaya mereka dalam memberikan aspek positif meskipun ide awal demokrasi bukan berasal dari Islam.
2. Intelektual muslim di Indonesia dalam berhadapan dengan konteks kenegaraan, mereka mengartikulasikan Islam ke dalam konsep keyakinan dan akhlaq dan hal-hal di luar itu dilakukan dengan ijtihad.

¹⁹Adi Sasono, *Menuju rakyat berdaulat: wawancara Adi Sasono Ketua Umum Dekopin (Dewan Koperasi Indonesia)*, Penerbit Republika, 2008. Hal. 279.

²⁰Ini adalah pengembangan dari pendapat Zainal Arifin Thoha dalam *Eksotisme Seni Budaya Islam: Khazanah Peradaban Dari Serambi Pesantren*, Zainal Arifin Thoha, Bukulaela, 2002. Hal 29.

²¹S. Yunanto, *Pintu-pintu menuju kebangkitan Islam dan Indonesia*, Forum Pengembangan Islam Dalam Perubahan Sosial (FORPIS), 2005 *Pintu-pintu menuju kebangkitan Islam dan Indonesia*, S. Yunanto, Forum Pengembangan Islam Dalam Perubahan Sosial (FORPIS), 2005. Hal. 18.

3. Intelektual muslim di Indonesia memandang bahwa untuk penerapan perundangan Islam baru hanya dapat diterapkan dalam masalah perkawinan.

Daftar Pustaka

- Adi Sasono, *Menuju rakyat berdaulat: wawancara Adi Sasono Ketua Umum Dekopin (Dewan Koperasi Indonesia)*, Penerbit Republika, 2008.
- Al-Brebesy, Ma'mun Murod , *Menyingkap pemikiran politik Gus Dur & Amien Rais Tentang Negara*, Raja Grafindo Persada, Jan 1, 1999.
- Beitinger, Verena -Lee, (Un) *Civil Society and Political Change in Indonesia: A Contested Arena*, Routledge, Jan 11, 2013.
- Comans, Fons, *Human Rights from Exclusion to Inclusion; Principles and Practice: An Anthology from the Work of Theo Van Boven*, Martinus Nijhoff Publishers, May 11, 2000.
- Frieda N. R. H., Darmono S. S., *Manusia seutuhnya, Beberapa Gagasan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1984.
- Kit, Gin Ooi, *Southeast Asia: A Historical Encyclopedia, from Angkor Wat to East Timor*, Volume 1, Santa Barbara, California.
- Kutoyo, Sutrisno, *Sejarah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Januari, 1997.
- Maarif, Ahmad Syafii , *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu, Masa Demokrasi Terpimpin, 1959-1965*, Gema Insani, 1996.
- Marshall Cavendish Reverence, *World and Its Peoples: Indonesia and East Timor, Eastern and Southern Asia*, Volume 10, New York, 2007.
- Mashad, Dhurorudin, *Akar konflik politik Islam di Indonesia*, Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Masykuri Abdillah, Wahid Wahab, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, Masykuri Abdillah, Wahid Wahab, PT Tiara Wacana, 1999.
- Monib, Mohammad , Islah Bahrawi, *Islam & Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Muljana, Slamet, *Kesadaran Nasional: dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan*, PT LKiS Pelangi Aksara, 2008.
- Mulkhan, Abdul Munier, *Politik Santri: Cara Menang Merebut Hati Rakyat*, Kanisius, 2009.
- Perwiranegara, Alamsyah Ratu , *Islam dan Pembangunan Politik di Indonesia*, Haji Masagung, 1987.
- Seksi Penerangan KOTI, *Gabungan Penerangan ABRI dalam Rangka Pengamanan Sidang Umum Istimewa M.P.R.S. Indonesia. Angkatan Bersenjata. Gabungan Penerangan* , 1967 - Indonesia.

- Sunny, Ismail, *Melacak jejak Prof. Dr. Ismail Suny, S.H., M.C.L.: Profesor, Investor, Dan Ambassador : Lima Puluh Tahun Perkawinan Ismail Suny-Rosna Daud, 1958-2008, Pustaka Sinar Harapan (Firm), Pustaka Sinar Harapan, 2008.*
- Thoha, Zainal Arifin dalam *Eksotisme Seni Budaya Islam: Khazanah Peradaban Dari Serambi Pesantren*, Zainal Arifin Thoha, Bukulaela, 2002.
- Yunanto, S., *Pintu-pintu menuju kebangkitan Islam dan Indonesia*, Forum Pengembangan Islam Dalam Perubahan Sosial (FORPIS), 2005